



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 622/2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur, memperhatikan penetapan status jalan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan penetapan ruas jalan menurut fungsinya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Status Jalan Nasional sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dan penetapan ruang jalan berdasarkan fungsi di Jawa Tengah sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 Dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan status jalan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 84);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);

✓

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
13. Keputusan Gubernur Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 Dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, dengan ruas jalan dan peta ruas jalannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2023



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 622/2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT
STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
					PROVINSI : (33) JAWA TENGAH JALAN PROVINSI	
1	113	P			KETANGGUNGAN - KERSANA - BANTARSARI / BTS. PROV JABAR	15,44
2	114	P			JATIBARANG / BTS. KAB TEGAL – KETANGGUNGAN	20,97
3	115	P			SLAWI - JATIBARANG / BTS. KAB BREBES	7,82
4	116	P			JATINEGARA / BTS. KAB PEMALANG – SLAWI	21,33
5	117	P			RANDUDONGKAL - JATINEGARA / BTS. KAB TEGAL	10,68
6	118	P			KESESI / BTS. KAB PEKALONGAN – BANTARBOLANG	20,92
7	119	P			KAJEN - KESESI / BTS. KAB PEMALANG	10,00
8	120	P			KAJEN - BTS. KAB BATANG	23,35
9	121	P			WONOTUNGGAL - BTS. KAB PEKALONGAN	5,31
10	122	P			BATANG - WONOTUNGGAL	12,07
11	123	P			WONOTUNGGAL - SURJO	28,80
12	124	P			BANYUPUTIH - PLANTUNGAN	29,60
13	125	P			SUKOREJO - PLANTUNGAN / BTS. KAB BATANG	11,41
14	126	P			CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO	33,40
15	127	P			UNGARAN - CANGKIRAN	17,23
16	127	P	11	K	JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN)	1,77
17	128	P			SEMARANG – GODONG	32,66
18	128	P	11	K	JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)	5,92
19	129	P			GODONG - PURWODADI	14,07
20	129	P	11	K	JL. A. YANI (PURWODADI)	0,60
21	130	P			LINGKAR UTARA PURWODADI	4,47
22	131	P			LINGKAR SELATAN PURWODADI	4,00
23	132	P			PURWODADI – WIROSARI	19,94
24	133	P			WIROSARI - KUNDURAN	15,75
25	134	P			KUNDURAN - NGAWEN - BLORA	28,50
26	135	P			DEMAK - GODONG	18,00
27	136	P			JATI - KLAMBU / BTS. KAB GROBOGAN	13,90
28	137	P			PURWODADI - KLAMBU / BTS. KAB KUDUS	22,82
29	138	P			WIROSARI - SULURSARI - SINGGET / BTS. KAB BLORA	24,26
30	139	P			SINGGET / BTS. KAB GROBOGAN - DOPLANG - CEPU	45,34
31	140	P			LASEM - SALE / BTS. PROV JATIM	31,24
32	141	P			JUWANA - TODANAN / BTS. KAB BLORA	22,45
33	142	P			TODANAN - NGAWEN	27,71
34	143	P			KERSANA - BANDUNGSARI	20,21
35	144	P			BANDUNGSARI - PENANGGAPAN / BTS. PROV JABAR	7,47
36	145	P			BANDUNGSARI - SALEM	26,54
37	146	P			SALEM - BTS. KAB CILACAP	4,63
38	147	P			CILOPADANG - BTS. KAB BREBES	12,95
39	148	P			BUMIAYU - SALEM	33,99

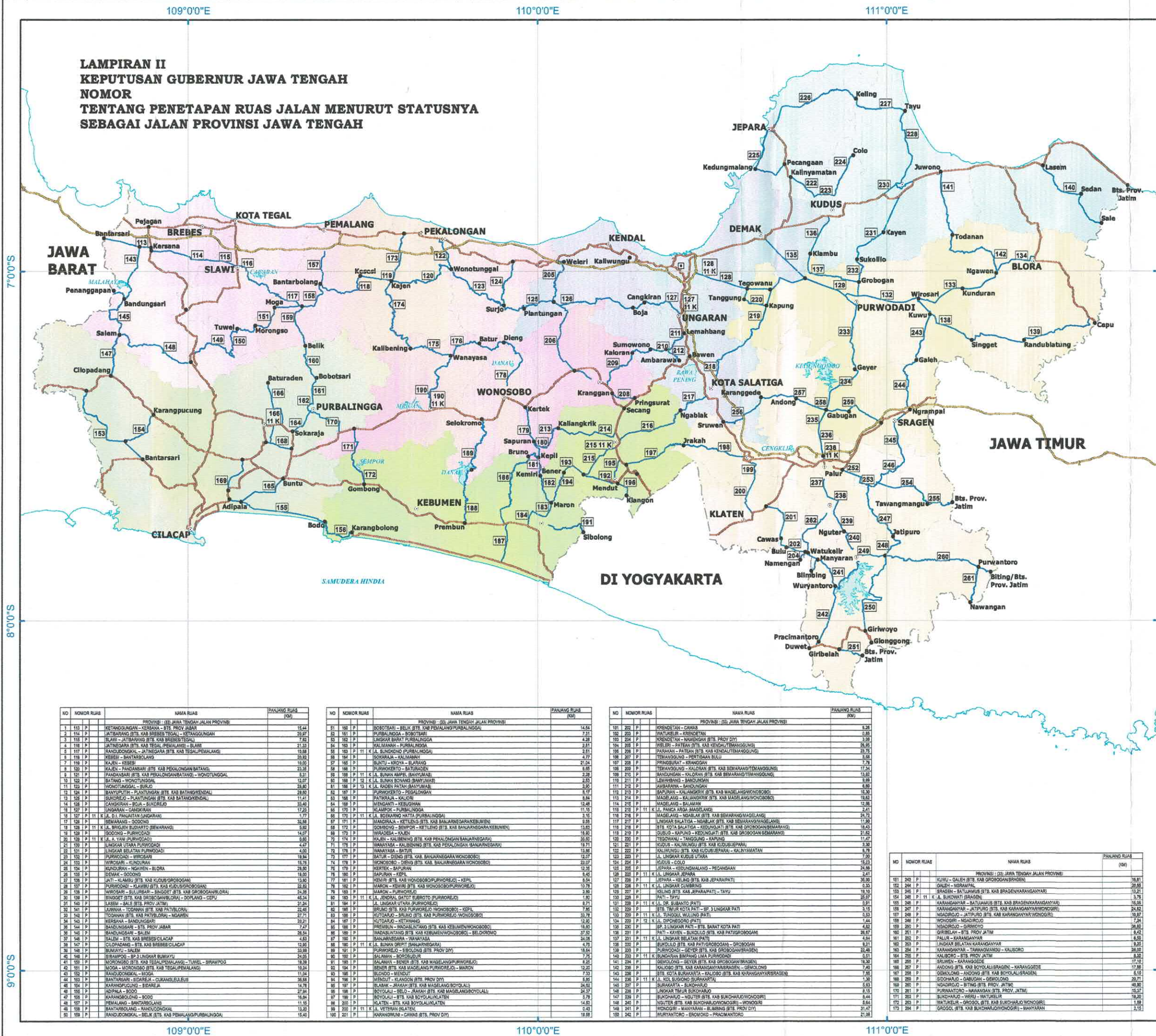
NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
40	149	P			SIRAMPOG - BUMIAYU	24,05
41	150	P			MORONGSO / BTS. KAB PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG	19,39
42	151	P			MOGA - MORONGSO / BTS. KAB TEGAL	10,24
43	152	P			RANDUDONGKAL - MOGA	11,04
44	153	P			BANTARSARI - SIDAREJA - CUKANGLEULEUS	35,68
45	154	P			KARANGPUCUNG - SIDAREJA	14,76
46	155	P			ADIPALA - BODO / AYAH	27,94
47	156	P			JLADRI - KARANGBOLONG - BODO / AYAH	16,84
48	157	P			PEMALANG - BANTARBOLANG	11,15
49	158	P			BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL	13,20
50	159	P			RANDUDONGKAL - BELIK / BTS. KAB PURBALINGGA	15,40
51	160	P			BOBOTSARI - BELIK / BTS. KAB PEMALANG	14,54
52	161	P			PURBALINGGA - BOBOTSARI	7,31
53	162	P			LINGKAR BARAT PURBALINGGA	4,28
54	163	P			KALIMANAH - PURBALINGGA	2,51
55	163	P	11	K	JL. SUNGKONO (PURBALINGGA)	2,51
56	164	P			SOKARAJA - KALIMANAH	4,77
57	165	P			BUNTU - KROYA - SLARANG	21,04
58	166	P			PURWOKERTO - BATURRADEN	8,65
59	166	P	11	K	JL. SUNAN AMPEL (BANYUMAS)	2,28
60	166	P	12	K	JL. SUNAN BONANG (BANYUMAS)	2,53
61	166	P	13	K	JL. RADEN PATAH (BANYUMAS)	2,90
62	167	P			PURWOKERTO - PEGALONGAN	6,17
63	168	P			PATIKRAJA - KALIORI	8,64
64	169	P			MENGANTI - KESUGIHAN	12,48
65	170	P			KLAMPOK - PURBALINGGA	11,15
66	170	P	11	K	JL. SOEKARNO HATTA (PURBALINGGA)	3,15
67	171	P			MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB KEBUMEN	9,56
68	172	P			GOMBONG - SEMPOR - KETILENG / BTS. KAB BANJARNEGARA	13,83
69	173	P			WIRADESA - KAJEN	16,90
70	174	P			KAJEN - KALIBENING / BTS. KAB BANJARNEGARA	35,50
71	175	P			WANAYASA - KALIBENING / BTS. KAB PEKALONGAN	19,71
72	176	P			WANAYASA - BATUR	13,86
73	177	P			BATUR - DIENG	12,07
74	178	P			WONOSOBO - DIENG / BTS. KAB BANJARNEGARA	22,07
75	179	P			KERTEK - SAPURAN	12,35
76	180	P			SAPURAN - KEPIL	6,45
77	181	P			KEMIRI - KEPIL	8,54
78	182	P			MARON - KEMIRI/ BTS. KAB WONOSOBO	10,78
79	183	P			MARON - PURWOREJO	2,89
80	183	P	11	K	JL. JENDRAL GATOT SUBROTO (PURWOREJO)	1,80
81	184	P			JL. LINGKAR UTARA (PURWOREJO)	9,71
82	185	P			BRUNO / BTS. KAB PURWOREJO - KEPIL	7,85
83	186	P			KUTOARJO - BRUNO / BTS. KAB WONOSOBO	33,78
84	187	P			KUTOARJO - KETAWANG	12,90
85	188	P			PREMBUN - WADASLINTANG / BTS. KAB WONOSOBO	16,60
86	189	P			WADASLINTANG - SELOKROMO	37,50
87	190	P			BANJARNEGARA - WANAYASA	24,08
88	190	P	11	K	JL. SUNAN GRIPIT (BANJARNEGARA)	4,76
89	191	P			PURWOREJO - SIBOLONG / BTS. PROV. DIY	16,64
90	192	P			SALAMAN - BOROBUDUR	7,75
91	193	P			SALAMAN - BENER / BTS. KAB PURWOREJO	8,25
92	194	P			BTS. KAB MAGELANG / BENER - MARON	12,20

NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
93	195	P			BLONDO - MENDUT	7,33
94	196	P			MENDUT - KLANGON / BTS. PROV. DIY	5,85
95	197	P			BLABAK - JRAKAH / BTS. KAB BOYOLALI	24,62
96	198	P			BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB MAGELANG	24,37
97	199	P			BOYOLALI - BTS. KAB KLATEN	5,78
98	200	P			BTS. KAB BOYOLALI - KLATEN	14,50
99	200	P	11	K	JL. VETERAN (KLATEN)	0,43
100	201	P			KARANGWUNI - BTS. PROV DIY	19,58
101	202	P			KRENDETAN - CAWAS	6,26
102	203	P			WATUKELIR - KRENDETAN	0,85
103	204	P			KRENDETAN - BTS. PROV DIY	3,08
104	205	P			WELERI - PATEAN / BTS. KAB KENDAL	26,95
105	206	P			PARAKAN - PATEAN / BTS. KAB TEMANGGUNG	23,75
106	207	P			TEMANGGUNG - PERTIGAAN BULU	5,58
107	208	P			PRINGSURAT - KRANGGAN	7,79
108	209	P			TEMANGGUNG - KALORAN / BTS. KAB SEMARANG	17,34
109	210	P			BANDUNGAN - KALORAN / BTS. KAB TEMANGGUNG	13,92
110	211	P			LEMAHBANG - BANDUNGAN	9,89
111	212	P			AMBARAWA - BANDUNGAN	6,60
112	213	P			SAPURAN - KALIANGKRIK / BTS. KAB MAGELANG	15,30
113	214	P			MAGELANG - KALIANGKRIK / BTS. KAB WONOSOBO	19,62
114	215	P			MAGELANG - SALAMAN	12,56
115	215	P	11	K	JL. PANCA ARGA (MAGELANG)	2,41
116	216	P			MAGELANG - NGABLAH / BTS. KAB SEMARANG	24,72
117	217	P			BTS. LINGKAR SALATIGA - NGABLAH / BTS. KAB MAGELANG	11,90
118	218	P			BTS. KOTA SALATIGA - KEDUNGJATI / BTS. KAB GROBOGAN	18,43
119	219	P			GUBUG - KAPUNG - KEDUNGJATI / BTS. KAB SEMARANG	21,62
120	220	P			TEGOWANU - TANGGUNG - KAPUNG	11,47
121	221	P			KUDUS - KALIWUNGU / BTS. KAB JEPARA	3,30
122	222	P			KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN	6,79
123	223	P			JL. LINGKAR KUDUS UTARA	7,00
124	224	P			KUDUS - COLO	15,23
125	225	P			JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAAN	24,88
126	225	P	11	K	JL. LINGKAR JEPARA	2,41
127	226	P			JEPARA - KELING / BTS. KAB PATI	35,00
128	226	P	11	K	JL. LINGKAR CUMBRING	0,33
129	227	P			KELING / BTS. KAB JEPARA - TAYU	19,10
130	228	P			PATI - TAYU	25,07
131	228	P	11	K	JL. DR. SUSANTO (PATI)	0,91
132	229	P			BTS. TIMUR KOTA PATI - BTS. LINGKAR PATI	3,15
133	229	P	11	K	JL. TUNGGUL WULUNG (PATI)	0,53
134	229	P	12	K	JL. DIPONEGORO (PATI)	1,44
135	230	P			BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI	4,82
136	231	P			PATI - KAYEN - SUKOLILO / BTS. KAB GROBOGAN	26,87
137	231	P	11	K	JL. LINGKAR SELATAN (PATI)	4,84
138	232	P			SUKOLILO / BTS. KAB PATI - GROBOGAN	9,21
139	233	P			PURWODADI - GEYER / BTS. KAB SRAGEN	22,48
140	233	P	11	K	BUNDARAN SIMPANG LIMA PURWODADI	0,51
141	234	P			GEMOLONG - GEYER / BTS. KAB GROBOGAN	19,30
142	235	P			KALIOSO / BTS. KAB KARANGANYAR - GEMOLONG	7,40
143	236	P			BTS. KOTA SURAKARTA - KALIOSO / BTS. KAB SRAGEN	7,85

NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)
144	236	P	11	K	JL. KOL SUGIONO (SURAKARTA)	1,30
145	237	P			SURAKARTA - SUKOHARJO	5,93
146	238	P			LINGKAR TIMUR SUKOHARJO	8,15
147	239	P			SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB WONOGIRI	8,44
148	240	P			NGUTER / BTS. KAB SUKOHARJO - WONOGIRI	5,64
149	241	P			WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV DIY	31,47
150	242	P			WURYANTORO - EROMOKO - PRACIMANTORO	21,06
151	243	P			KUWU - GALEH / BTS. KAB SRAGEN	16,81
152	244	P			GALEH - NGRAMPAL	20,65
153	245	P			SRAGEN - BATUJAMUS / BTS. KAB KARANGANYAR	13,21
154	245	P	11	K	JL. SUKOWATI (SRAGEN)	3,76
155	246	P			KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB SRAGEN	15,05
156	247	P			KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB WONOGIRI	24,82
157	248	P			NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB KARANGANYAR	10,87
158	249	P			WONOGIRI - NGADIROJO	7,24
159	250	P			NGADIROJO - GIRIWOYO	36,80
160	251	P			GIRIBELAH - BTS. PROV JATIM	8,42
161	252	P			PALUR - KARANGANYAR	6,50
162	253	P			LINGKAR SELATAN KARANGANYAR	9,25
163	254	P			KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO	26,00
164	255	P			KALISORO - BTS. PROV JATIM	8,30
165	256	P			SRUWEN - KARANGGEDE	17,10
166	257	P			ANDONG / BTS. KAB SRAGEN - KARANGGEDE	17,66
167	258	P			GEMOLONG - ANDONG / BTS. KAB BOYOLALI	5,10
168	259	P			SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	20,71
169	260	P			NGADIROJO - BITING / BTS. PROV JATIM	40,90
170	261	P			PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV JATIM	15,37
171	262	P			SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR	18,20
172	263	P			WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB WONOGIRI	1,89
173	264	P			GROGOL / BTS. KAB SUKOHARJO - MANYARAN	2,15
TOTAL						2.440,12

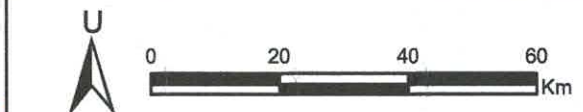

 GUBERNUR JAWA TENGAH,
[Signature]
 ANJAN PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH



Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

Legenda

- Kota**
- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Simpul
- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Garis Pantai
- Jalan**
- Jalan Tol
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
- Perairan**
- Waduk
- Balai**
- Cilacap
 - Magelang
 - Pati
 - Pekalongan
 - Purwodadi
 - Semarang
 - Surakarta
 - Tegal
 - Wonosobo

DIAGRAM LOKASI



SUMBER:
1. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000, BIG
2. Peta Administrasi
3. Survei Jalan Provinsi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Pranowo

GANJAR PRANOWO